

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai manajemen krisis kasus pelecehan seksual di Universitas Andalas (UNAND), dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait peran strategis Humas (Hubungan Masyarakat) dalam menangani komunikasi krisis, terutama pada kasus yang sensitif seperti pelecehan seksual. Penelitian ini menyoroti bahwa Humas memegang peran utama dalam menyebarkan informasi yang akurat dan menjaga komunikasi baik di lingkungan internal maupun eksternal. Namun, meskipun peran Humas sangat penting, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pelatihan manajemen krisis masih belum dilakukan secara rutin. Sebagian besar pelatihan baru diadakan setelah krisis terjadi, yang menyebabkan respons Humas lebih bersifat reaktif.

Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga tahap utama dalam manajemen krisis, yakni pra-krisis, respons krisis, dan post-krisis. Pada tahap pra-krisis, Humas berusaha melakukan pencegahan dengan membentuk satuan tugas dan memantau pemberitaan media. Namun, birokrasi yang kompleks sering memperlambat respons yang diberikan, yang berdampak pada efektivitas upaya penanganan krisis. Selain itu, temuan ini menunjukkan bahwa Universitas Andalas belum memiliki Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang terperinci untuk menangani kasus pelecehan seksual. Selama ini, Humas hanya mengandalkan SOP umum yang kurang spesifik untuk menangani isu ini, menunjukkan perlunya pengembangan SOP yang lebih rinci dan jelas, terutama untuk kasus serupa di masa depan.

Dampak dari kasus pelecehan seksual terhadap citra universitas juga menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Meskipun kepercayaan publik terhadap universitas tidak mengalami krisis yang signifikan, namun penelitian menunjukkan adanya kekhawatiran dari orang tua mahasiswa. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang konsisten sebagai kunci untuk memulihkan kepercayaan publik serta menjaga reputasi universitas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi komunikasi krisis yang lebih efektif, yang meliputi pelatihan berkala, penguatan komunikasi internal, serta kolaborasi yang lebih erat antara Humas dan pimpinan universitas dalam meningkatkan kesiapan menghadapi krisis di masa depan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan dalam pelatihan manajemen krisis, penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif, dan langkah-langkah proaktif dalam menghadapi krisis. Hal tersebut sejalan dengan beberapa hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini sebagai salah satu pendukung bahwa dalam menyelesaikan sebuah krisis, humas harus memperhatikan seluruh aspek internal dan eksternal secara maksimal. Dengan melakukan perbaikan dalam aspek-

aspek tersebut, Universitas Andalas dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, mendukung, dan terpercaya bagi seluruh civitas akademika, serta siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas Universitas Andalas (UNAND) dalam menangani kasus pelecehan seksual, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen krisis dan menjaga reputasi institusi:

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Khusus untuk Manajemen Krisis terkait Kasus Pelecehan Seksual Universitas Andalas sebaiknya segera menyusun dan mengimplementasikan SOP yang lebih spesifik untuk menangani krisis akibat kasus pelecehan seksual. SOP tersebut harus mencakup langkah- langkah yang jelas dalam menghadapi setiap tahapan krisis, mulai dari pra- krisis, respons krisis, hingga pasca-krisis, untuk memastikan penanganan yang lebih terarah dan sistematis. Dengan adanya SOP yang terperinci, Humas dapat mengurangi ketergantungan pada prosedur umum yang kurang efektif dalam menangani isu sensitif ini.

2. Pelatihan Manajemen Krisis yang Rutin untuk Tim Humas Untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan respons tim Humas, disarankan agar pelatihan manajemen krisis dilakukan secara berkala. Pelatihan ini tidak hanya perlu diadakan

saat krisis terjadi, tetapi harus menjadi bagian dari program pengembangan kapasitas internal yang berkelanjutan. Dengan demikian, tim Humas dapat lebih proaktif dan siap menghadapi berbagai potensi krisis yang mungkin muncul, termasuk kasus pelecehan seksual.

3. Peningkatan Komunikasi Internal dan Kolaborasi dengan Pimpinan Universitas

Dalam menghadapi krisis, komunikasi internal yang efektif antara Humas dan pimpinan universitas sangat penting untuk memastikan penyampaian informasi yang konsisten dan akurat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi dan kolaborasi yang lebih erat antara Humas dan pihak manajemen universitas. Selain itu, pengembangan sistem komunikasi internal yang lebih transparan dan efisien akan sangat mendukung proses pengambilan keputusan dalam situasi krisis.

4. Proaktif dalam Membangun Hubungan dengan Media dan Menyebarkan Informasi yang Transparan

Humas perlu lebih proaktif dalam membangun hubungan yang baik dengan media dan memberikan informasi yang transparan kepada publik, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti pelecehan seksual. Mengadakan konferensi pers dan memberikan penjelasan yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil oleh universitas dapat membantu mengurangi *miss* komunikasi dan menjaga citra institusi. Keterbukaan dalam memberikan informasi juga akan *take down* memperkuat kepercayaan publik terhadap universitas.

5. Peningkatan Dukungan bagi Korban Pelecehan Seksual Universitas Andalas sebaiknya memberikan perhatian lebih kepada korban pelecehan seksual dengan menyediakan dukungan psikologis dan hukum yang memadai. Pembentukan unit khusus yang menangani masalah kekerasan seksual, seperti Satgas PPKS (Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual), dapat menjadi salah satu solusi untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan bantuan yang optimal. Ini juga akan memperlihatkan komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman dan mendukung.

6. Penerapan Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Pencegahan Pelecehan Seksual sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelecehan seksual di perguruan tinggi, Universitas Andalas perlu mengembangkan kebijakan internal yang lebih jelas dan komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu di universitas, baik mahasiswa maupun dosen, memahami hak-hak mereka serta prosedur yang harus ditempuh apabila terjadi kekerasan atau pelecehan seksual.

7. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi atau bahan acuan dalam penelitian yang berhubungan dengan manajemen krisis di ranah kehumasan.